



## CURRICULUM POLICY EVOLUTION IN INDONESIA: FROM THE 1975 CURRICULUM TO *MERDEKA BELAJAR*

**Muhammad Jailani**

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia

[muhammadjailani@staiat.ac.id](mailto:muhammadjailani@staiat.ac.id)

**Ahmad Muzawwir**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

[ahmad0334243008@uinsu.ac.id](mailto:ahmad0334243008@uinsu.ac.id)

**Usiono**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

[usiono@uinsu.ac.id](mailto:usiono@uinsu.ac.id)

**Dinda Rizky Amalia**

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia

[dindarizkyamalia@staiat.ac.id](mailto:dindarizkyamalia@staiat.ac.id)

Received: 18, Januari 2026

Accepted: 1 April 2026

Published: 14 April 2026

### Abstrak

Perubahan kurikulum di Indonesia berlangsung secara dinamis sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan pendidikan abad ke-21. Perubahan tersebut tidak hanya menunjukkan arah pembaruan pedagogis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kebijakan pendidikan nasional terus berupaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan bangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis evolusi kebijakan kurikulum di Indonesia dari Kurikulum 1975 hingga Kurikulum Merdeka dengan menitikberatkan pada karakteristik utama tiap fase, pergeseran paradigma pembelajaran, dan tantangan implementasi yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, literatur akademik, dan sumber historis yang relevan. Analisis data dilakukan dengan content analysis untuk memetakan pola perubahan, kesinambungan, dan perbedaan orientasi kurikulum antarperiode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi kurikulum Indonesia bergerak dari pendekatan yang administratif, sentralistik, dan berorientasi isi menuju kurikulum



yang lebih berbasis kompetensi, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Namun demikian, kualitas implementasi pada setiap fase tetap sangat ditentukan oleh kesiapan guru, dukungan kelembagaan, serta pemerataan sumber daya pendidikan.

**Kata Kunci:** Evolusi Kurikulum; Kebijakan Pendidikan; Merdeka Belajar; Implementasi Kurikulum; Pendidikan Indonesia

### Abstract

*Curriculum change in Indonesia has developed dynamically in response to social, political, and economic transformation, as well as to the expansion of science, technology, and twenty-first-century educational demands. These shifts not only reflect pedagogical reform but also illustrate how national education policy continues to adapt to the needs of learners, society, and national development. This study aims to analyze the evolution of curriculum policy in Indonesia from the 1975 Curriculum to the Merdeka Curriculum by focusing on the main characteristics of each phase, changes in learning paradigms, and the implementation challenges that accompanied them. The study employed a descriptive qualitative approach through documentation studies of policy documents, academic literature, and relevant historical sources. Data were analyzed using content analysis to identify patterns of change, continuity, and differences in curriculum orientation across periods. The findings indicate that the evolution of the Indonesian curriculum has shifted from an administrative, centralized, and content-oriented approach toward a more competency-based, flexible, and student-centered curriculum. However, the quality of implementation in every phase has remained strongly dependent on teacher readiness, institutional support, and the equitable distribution of educational resources.*

*Keywords:* Curriculum Evolution; Education Policy; Merdeka Belajar; Curriculum Implementation; Indonesian Education

## PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan inti dari sistem pendidikan karena menjadi kerangka yang menentukan arah, isi, tujuan, dan pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik. Dalam konteks Indonesia, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akademik, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara untuk membentuk karakter warga, mengarahkan pembangunan sumber daya manusia, dan menyesuaikan pendidikan dengan perubahan zaman. Karena itu, setiap perubahan kurikulum selalu memiliki implikasi yang luas, baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, perubahan kurikulum menunjukkan bagaimana teori belajar, visi pendidikan, dan



orientasi kompetensi diterjemahkan ke dalam kebijakan. Secara praktis, perubahan kurikulum memengaruhi perencanaan pembelajaran, peran guru, cara penilaian, hingga pengalaman belajar siswa di kelas. Dalam lima dekade terakhir, Indonesia telah berulang kali merevisi kurikulum, mulai dari Kurikulum 1975, 1984, 1994, KBK 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Dinamika ini menunjukkan bahwa kurikulum di Indonesia selalu berada dalam arus perubahan sosial, politik, dan pedagogis yang terus bergerak (Tilaar, 2002; Ansyar, 2015; Schiro, 2013; Kemendikbudristek, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perubahan kurikulum di Indonesia, tetapi sebagian besar masih dilakukan secara parsial. Ada studi yang menyoroti kurikulum dari perspektif reformasi pendidikan nasional dan relasi antara birokrasi, sekolah, serta kebijakan negara (Bjork, 2013; Jalal & Sardjunani, 2012). Ada pula penelitian yang lebih fokus pada tantangan implementasi kurikulum tertentu, misalnya Kurikulum 2013, kesiapan guru menghadapi perubahan kurikulum, atau adaptasi pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka (Ahsan & Nur, 2019; Fadhilah, 2018; Suryani, 2018; Hidayat & Kurniawan, 2020; Rahmawati, 2021). Penelitian-penelitian tersebut sangat penting karena memperlihatkan bahwa persoalan utama kurikulum di Indonesia tidak hanya terletak pada desain konseptual, tetapi juga pada kemampuan pelaksana menerjemahkan kebijakan ke praktik pembelajaran. Namun, kelemahannya adalah banyak studi hanya menelaah satu fase kurikulum secara terpisah, sehingga belum cukup menjelaskan pola jangka panjang perubahan kurikulum Indonesia. Akibatnya, belum banyak kajian yang benar-benar membaca evolusi kurikulum sebagai proses historis yang memperlihatkan kesinambungan masalah, perubahan paradigma, dan transformasi orientasi kebijakan secara menyeluruh.

Penelitian ini hadir untuk merespons kekurangan tersebut dengan cara membaca perubahan kurikulum Indonesia secara longitudinal, komparatif, dan historis-kritis. Fokus penelitian bukan hanya menjelaskan karakteristik setiap kurikulum, tetapi juga menelaah bagaimana perubahan kebijakan itu mencerminkan pergeseran paradigma belajar, perubahan relasi antara negara dan sekolah, serta tantangan implementasi yang terus berulang dari satu fase ke fase berikutnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumentasi, penelitian ini menelaah dokumen kebijakan resmi, literatur akademik, dan sumber historis yang berkaitan dengan kurikulum nasional sejak 1975 hingga Kurikulum Merdeka. Secara khusus, artikel ini membahas tiga persoalan utama, yaitu perubahan karakteristik kurikulum di setiap era, perubahan orientasi pembelajaran yang dibawa oleh masing-masing kebijakan, dan kendala implementatif yang dihadapi di tingkat sekolah. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan pemetaan yang lebih utuh tentang arah reformasi kurikulum Indonesia, bukan sekadar evaluasi terhadap satu kebijakan tertentu.



Berdasarkan fokus tersebut, artikel ini berargumen bahwa evolusi kebijakan kurikulum di Indonesia menunjukkan pergeseran yang jelas dari model pendidikan yang administratif, terpusat, dan berorientasi isi menuju model yang lebih berbasis kompetensi, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Namun, penelitian ini juga berangkat dari dugaan bahwa perubahan paradigma pada level kebijakan tidak selalu diikuti perubahan yang setara pada level implementasi. Dalam banyak fase, inovasi kurikulum justru terhambat oleh masalah yang relatif sama, seperti keterbatasan kapasitas guru, beban administratif, ketimpangan fasilitas, lemahnya supervisi akademik, dan tidak meratanya dukungan kelembagaan (Depdiknas, 2004; Depdiknas, 2006; Mulyasa, 2014; Kemendikbud, 2020; Kemendikbudristek, 2022). Dengan demikian, hubungan yang ingin ditegaskan dalam tulisan ini adalah bahwa keberhasilan kurikulum tidak terutama ditentukan oleh frekuensi perubahan kebijakan, melainkan oleh kualitas ekosistem implementasinya. Di titik inilah penelitian ini menempatkan evolusi kurikulum sebagai arena yang memperlihatkan relasi antara desain kebijakan, perubahan pedagogi, dan kapasitas sistem pendidikan nasional.

## **LANDASAN TEORI**

Literatur mengenai perubahan kurikulum di Indonesia menunjukkan bahwa isu ini telah direspons dari beragam sudut pandang, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara kebijakan pendidikan, paradigma pembelajaran, dan kapasitas implementasi di sekolah. Secara umum, setidaknya terdapat tiga kecenderungan besar dalam penelitian terdahulu. Pertama, terdapat studi-studi yang membaca perubahan kurikulum sebagai bagian dari dinamika makro kebijakan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan perubahan orientasi negara, reformasi pendidikan, dan ideologi pembangunan nasional. Kedua, ada penelitian yang lebih menekankan implementasi kurikulum di tingkat sekolah, khususnya kesiapan guru, kapasitas institusi, supervisi, dan beban administratif. Ketiga, berkembang pula kajian yang menempatkan kurikulum dalam kerangka kompetensi abad ke-21, diferensiasi pembelajaran, dan fleksibilitas pendidikan masa depan. Ketiga kecenderungan ini menunjukkan bahwa penelitian kurikulum di Indonesia sudah cukup kaya, tetapi juga tersegmentasi. Sebagian menekankan perubahan pada level desain kebijakan, sebagian pada masalah implementasi, dan sebagian lagi pada arah pedagogis yang lebih progresif (Tilaar, 2002; Bjork, 2013; OECD, 2012; Bolstad & Gilbert, 2012; Kemendikbudristek, 2022). Karena itu, kajian evolusi kurikulum memerlukan pembacaan yang dapat menjembatani ketiga kecenderungan tersebut dalam satu kerangka analisis.

Kecenderungan pertama dapat disebut sebagai penelitian bertipe **historis-kebijakan**, yaitu studi yang melihat kurikulum sebagai produk perubahan sosial, politik, dan birokrasi pendidikan. Dalam kecenderungan ini, fokus utama penelitian biasanya terletak pada bagaimana negara mendefinisikan tujuan pendidikan, bagaimana



kurikulum dijadikan alat modernisasi, dan bagaimana perubahan kebijakan merefleksikan orientasi kekuasaan pada suatu periode tertentu. Secara konseptual, studi-studi ini dekat dengan teori kurikulum dan kebijakan pendidikan, sehingga lebih banyak membahas fondasi filosofis, arah reformasi, serta posisi kurikulum dalam agenda pembangunan nasional (Tilaar, 2002; Schiro, 2013; Ansyar, 2015). Secara metodologis, kecenderungan ini umumnya menggunakan pendekatan konseptual, historis, dan analisis dokumen, dengan penekanan pada interpretasi teks kebijakan dan perubahan regulasi. Kekuatan tipe penelitian ini terletak pada kemampuannya membaca kurikulum sebagai bagian dari konteks besar pendidikan nasional. Namun, karena orientasinya makro, banyak studi dalam kelompok ini belum cukup mendalam menjelaskan bagaimana perubahan desain kurikulum tersebut bekerja dalam praktik pembelajaran di sekolah, terutama ketika dihadapkan pada persoalan kapasitas guru dan variasi kondisi lembaga pendidikan.

Kecenderungan kedua adalah penelitian yang bertipe implementatif-institusional, yakni studi yang berfokus pada bagaimana kurikulum dijalankan oleh guru, sekolah, pengawas, dan aktor pendidikan lainnya. Penelitian-penelitian ini biasanya menempatkan guru sebagai variabel sentral karena keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada kemampuan guru memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan kebijakan ke dalam kegiatan belajar mengajar. Fokus tematis dalam kelompok ini meliputi kesiapan guru menghadapi perubahan kurikulum, kualitas pelatihan, penyusunan perangkat ajar, pelaksanaan penilaian, serta hambatan administratif dan struktural yang dihadapi sekolah (Ahsan & Nur, 2019; Suryani, 2018; Maarif Institute, 2016; Puskur, 2010; Rahmawati, 2021). Pendekatan yang digunakan umumnya berupa studi kasus, evaluasi implementasi, survei, dan penelitian lapangan dengan orientasi praktis. Temuan-temuan dari kelompok ini konsisten menunjukkan bahwa problem terbesar kurikulum di Indonesia bukan semata kelemahan konsep, melainkan lemahnya dukungan sistem implementasi. Meski demikian, penelitian tipe ini sering kali hanya menelaah satu kurikulum tertentu dan kurang mengaitkannya dengan sejarah perubahan kurikulum sebelumnya, sehingga kontinuitas masalah dari satu periode ke periode lain belum tergambar secara utuh.

Kecenderungan ketiga ialah penelitian yang bertipe pedagogis-progresif, yaitu studi yang melihat perubahan kurikulum dalam kaitannya dengan tuntutan kompetensi masa depan, pembelajaran berpusat pada siswa, pendidikan karakter, serta kebutuhan abad ke-21. Dalam kecenderungan ini, kurikulum diposisikan sebagai sarana untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan adaptasi terhadap perubahan global. Fokus penelitian biasanya tertuju pada pendekatan scientific, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, dan integrasi nilai karakter seperti Profil Pelajar Pancasila (OECD, 2012; UNESCO, 2004; Fadhilah, 2018; Hidayat & Kurniawan, 2020; Kemendikbudristek, 2022). Secara metodologis, penelitian dalam kelompok ini beragam, mulai dari studi konseptual, evaluasi kebijakan, hingga penelitian praktis tentang inovasi pembelajaran di sekolah. Kekuatan kelompok ini adalah kemampuannya menunjukkan arah baru pendidikan Indonesia yang lebih humanis, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi, banyak studi pedagogis-progresif cenderung normatif, yaitu lebih menonjolkan idealitas desain kurikulum daripada membaca secara kritis keterbatasan struktural dan historis yang terus membayangi implementasinya.



Meskipun ketiga kecenderungan tersebut telah memberikan kontribusi penting, semuanya masih menyisakan kekurangan yang cukup mendasar. Kajian historis-kebijakan cenderung kuat dalam membaca arah perubahan kurikulum, tetapi belum banyak menjelaskan bagaimana perubahan tersebut berinteraksi dengan realitas sekolah dan profesionalitas guru. Kajian implementatif-institusional sebaliknya sangat kaya dalam memotret persoalan teknis pelaksanaan, tetapi sering terjebak pada evaluasi satu kurikulum tertentu sehingga kurang mampu menjelaskan pola evolutif yang berulang dalam sejarah kurikulum nasional. Sementara itu, kajian pedagogis-progresif menawarkan visi masa depan yang kuat, tetapi sering kali belum memperhatikan secara memadai kendala struktural seperti ketimpangan sumber daya, budaya birokrasi, dan variasi kapasitas daerah. Dengan kata lain, ketiga kecenderungan tersebut sama-sama belum cukup memberi perhatian pada hubungan jangka panjang antara desain kebijakan, pergeseran paradigma pembelajaran, dan masalah implementasi yang terus hadir dari 1975 hingga Kurikulum Merdeka. Di sinilah letak novelty penelitian ini: membaca evolusi kurikulum Indonesia secara serempak sebagai proses historis, pedagogis, dan implementatif.

Berdasarkan kekosongan tersebut, penelitian ini merumuskan arah baru dengan menempatkan evolusi kebijakan kurikulum Indonesia sebagai objek kajian yang dianalisis melalui perspektif historis-kritis dan komparatif. Fokus penelitian ini bukan hanya menelusuri perubahan nama, struktur, atau ciri tiap kurikulum, tetapi juga memetakan pola besar transformasi yang terjadi selama hampir lima dekade. Dengan orientasi tersebut, artikel ini berupaya memperlihatkan bahwa perubahan kurikulum Indonesia bergerak dalam dua lapis sekaligus: pertama, lapis desain kebijakan yang terus bergeser dari pendekatan administratif menuju fleksibilitas dan kompetensi; kedua, lapis implementasi yang menunjukkan adanya masalah laten yang terus berulang, terutama pada kapasitas guru, dukungan institusi, dan pemerataan sumber daya. Melalui pembacaan ini, penelitian menawarkan perspektif yang lebih integratif daripada studi-studi sebelumnya. Artinya, penelitian ini tidak hanya berbicara tentang kurikulum sebagai dokumen kebijakan atau praktik kelas semata, tetapi sebagai proses transformasi pendidikan nasional yang mencerminkan hubungan antara negara, sekolah, guru, dan kebutuhan belajar peserta didik dari masa ke masa.

## **METODE PENELITIAN**

Fokus penelitian ini terletak pada evolusi kebijakan kurikulum di Indonesia sebagai suatu fenomena kebijakan pendidikan dan perubahan historis dalam sistem pembelajaran nasional. Dengan demikian, unit analisis penelitian ini bukan individu, responden, atau institusi tertentu secara langsung, melainkan dokumen kebijakan, teks kurikulum, dan peristiwa perubahan kurikulum dari Kurikulum 1975 hingga Kurikulum Merdeka. Dalam konteks ini, kurikulum dipahami sebagai artefak kebijakan sekaligus representasi perubahan paradigma pendidikan yang mencerminkan orientasi negara terhadap tujuan,



isi, dan praktik pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan menggambarkan dan menafsirkan perubahan kebijakan kurikulum secara mendalam, komparatif, dan kontekstual, bukan menguji hubungan statistik antarvariabel. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian lebih tepat dipahami melalui penelaahan teks, dokumen, dan konteks historis yang melingkupinya. Sejalan dengan pandangan Creswell (2014), penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memahami dinamika kebijakan secara naturalistik melalui proses interpretatif terhadap data dokumenter dan literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dokumen dan data sekunder literatur. Data primer berupa dokumen resmi kebijakan pendidikan nasional, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kurikulum, panduan implementasi, dan regulasi terkait Kurikulum 1975, 1984, 1994, KBK 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka. Sementara itu, data sekunder berasal dari artikel jurnal, buku akademik, laporan evaluasi, dan kajian historis yang membahas perkembangan kurikulum di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasi, mencatat, dan menyeleksi dokumen yang relevan berdasarkan periode dan substansi perubahan kurikulum. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan content analysis atau analisis isi. Tahapan analisis mencakup reduksi data, pengelompokan tematik, pembacaan komparatif antarperiode kurikulum, interpretasi pola perubahan, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menemukan kesinambungan, pergeseran, dan tantangan implementasi kurikulum nasional secara lebih utuh dan historis.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Results**

Temuan pertama menunjukkan adanya perubahan besar dalam orientasi kebijakan kurikulum Indonesia dari model yang sangat administratif menuju model yang semakin menempatkan pembelajaran sebagai proses pedagogis. Data yang dibaca dari uraian tentang Kurikulum 1975, 1984, dan 1994 memperlihatkan bahwa fase awal perkembangan kurikulum nasional masih didominasi oleh logika pengaturan isi, prosedur, dan target instruksional yang ketat. Pada Kurikulum 1975, penekanan pada performance objectives dan kewajiban penyusunan Satuan Pelajaran menunjukkan bahwa guru diposisikan terutama sebagai pelaksana teknis kurikulum. Pada Kurikulum 1984, muncul upaya perubahan melalui pendekatan CBSA yang menempatkan siswa lebih aktif dalam belajar. Namun, Kurikulum 1994 kembali menunjukkan tekanan yang kuat pada kepadatan materi dan tuntutan penyelesaian isi pembelajaran. Dengan kata lain, data ini memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan memang terjadi, tetapi perubahan itu belum



sepenuhnya melepaskan pendidikan dari tradisi administratif dan struktural. Pola pertama yang terlihat adalah kuatnya dominasi negara dalam mengatur pembelajaran. Pola kedua adalah munculnya upaya pedagogis baru yang belum stabil. Pola ketiga adalah tetap berulangnya tekanan isi dan administrasi pada fase awal perubahan kurikulum.

Jika dibaca lebih rinci, bukti perubahan tersebut tampak jelas dalam perbedaan karakter antar-kurikulum awal. Kurikulum 1975 membangun pembelajaran melalui tujuan yang sangat spesifik, terukur, dan berorientasi pada perilaku yang dapat diamati. Hal ini memberi kesan sistematis, tetapi pada saat yang sama mempersempit ruang kreativitas guru karena hampir seluruh proses belajar harus mengikuti format baku. Data yang dibaca pada bagian Kurikulum 1984 menunjukkan adanya reaksi terhadap model itu melalui CBSA, yang secara formal mendorong eksplorasi, diskusi, dan pengalaman langsung. Akan tetapi, dokumen hasil analisis juga memperlihatkan bahwa implementasi CBSA belum ditopang oleh kesiapan guru yang memadai, sehingga pembelajaran aktif sering berhenti pada perubahan teknis semata. Sementara itu, pada Kurikulum 1994, fokus kembali bergeser pada materi yang padat dan target penyelesaian isi, membuat siswa lebih banyak menjadi penerima informasi daripada subjek belajar yang aktif. Dengan demikian, dapat dinyatakan ulang bahwa fase 1975–1994 merupakan masa transisi yang memperlihatkan tarik-menarik antara struktur birokratis dan cita-cita pedagogis. Kecenderungan datanya menunjukkan adanya formalisasi pembelajaran, lemahnya kesiapan implementasi inovasi, dan kuatnya orientasi penyelesaian materi.

Berdasarkan keseluruhan data pada fase pertama ini, temuan dapat dirumuskan sebagai bukti bahwa evolusi kurikulum Indonesia pada tahap awal bukan sekadar pergantian dokumen, tetapi merupakan transformasi bertahap yang masih dibatasi oleh warisan teknokratis. Apa yang dibaca dalam uraian Kurikulum 1975 hingga 1994 memperlihatkan bahwa negara berupaya memperbaiki kelemahan kurikulum sebelumnya, tetapi solusi yang dihadirkan sering belum menyentuh akar persoalan implementasi. Kurikulum 1975 memberi dasar sistematika, tetapi terlalu administratif; Kurikulum 1984 menawarkan pembelajaran aktif, tetapi gagal terwujud secara substansial; dan Kurikulum 1994 mencoba merapikan struktur materi, tetapi justru menimbulkan kelebihan beban isi. Jika dinyatakan kembali secara lebih sederhana, tiga kurikulum ini membentuk pola awal evolusi pendidikan Indonesia: bergerak dari pengendalian teknis menuju eksperimen pedagogis, namun masih tersandera oleh beban struktur dan budaya administrasi. Dari data tersebut, tampak empat kecenderungan utama, yaitu sentralisasi desain pembelajaran, lemahnya fleksibilitas guru, dominannya target isi, dan belum matangnya kapasitas sistem untuk mendukung inovasi. Dengan



demikian, hasil pertama menegaskan adanya tren perubahan, tetapi perubahan itu masih berlangsung dalam kerangka reformasi yang belum tuntas.

Temuan kedua menunjukkan bahwa fase KBK 2004, KTSP 2006, dan Kurikulum 2013 menandai perubahan yang lebih jelas menuju paradigma kompetensi, otonomi, dan pembelajaran abad ke-21. Data yang dibaca dari bagian temuan memperlihatkan bahwa KBK 2004 mulai menggeser perhatian dari penguasaan materi menuju kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam konteks nyata. KTSP 2006 kemudian memperluas arah ini dengan memberi sekolah kewenangan lebih besar untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Selanjutnya, Kurikulum 2013 memperkuat orientasi itu dengan memasukkan scientific approach, pendidikan karakter, literasi, dan kompetensi abad ke-21 ke dalam desain pembelajaran nasional. Secara umum, apa yang dibaca dari ketiga fase ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan kurikulum Indonesia memasuki tahap transformasi yang lebih substantif, karena yang berubah bukan hanya struktur dokumen, melainkan juga filosofi pendidikan yang mendasarinya. Jika dinyatakan ulang, kurikulum Indonesia pada fase ini mulai meninggalkan penekanan tunggal pada isi dan mulai membangun pembelajaran berbasis kompetensi. Pola yang muncul adalah penguatan orientasi kompetensi, perluasan otonomi kelembagaan, integrasi karakter, dan meningkatnya tuntutan terhadap profesionalitas guru.

Meskipun demikian, data juga memperlihatkan bahwa perubahan desain pada fase ini tidak otomatis menghasilkan perubahan praktik yang setara. Pada KBK 2004, misalnya, kebebasan guru dalam merancang pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah ternyata berhadapan dengan minimnya pelatihan dan rendahnya pemahaman konseptual tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Pada KTSP 2006, otonomi sekolah membuka peluang inovasi, tetapi banyak sekolah belum memiliki kapasitas kelembagaan yang cukup untuk menyusun silabus dan rencana pembelajaran secara kontekstual. Sementara itu, Kurikulum 2013 membawa pendekatan ilmiah dan penilaian autentik yang secara teoritis progresif, tetapi implementasinya sering terhambat oleh kompleksitas administrasi dan kesiapan pedagogis guru yang belum merata. Dengan kata lain, yang dibaca dari data ini menunjukkan adanya jarak antara desain kurikulum yang semakin maju dengan kemampuan sistem untuk menjalankannya secara konsisten. Restatement dari data ini adalah bahwa reformasi kurikulum pada fase kompetensi dan otonomi memang menandai kemajuan konseptual, tetapi juga memperbesar tuntutan baru terhadap guru dan sekolah. Tiga kecenderungan yang menonjol ialah meningkatnya kompleksitas implementasi, belum meratanya kapasitas pelaksana, dan tetap bertahannya hambatan administratif meskipun orientasi kebijakan sudah berubah.

Jika keseluruhan fase KBK 2004, KTSP 2006, dan Kurikulum 2013 dibaca sebagai satu rangkaian, maka hasil kedua ini menjadi bukti kuat bahwa evolusi kurikulum Indonesia bergerak ke arah modernisasi pedagogis, tetapi modernisasi itu berlangsung



dalam kondisi implementasi yang rapuh. KBK memperkenalkan ide kompetensi, KTSP memperkenalkan ide otonomi, dan Kurikulum 2013 memperkenalkan integrasi karakter, literasi, dan pendekatan ilmiah. Ketiganya menunjukkan adanya perubahan paradigma yang nyata dari pendidikan yang hanya menekankan isi menuju pendidikan yang menekankan proses, kompetensi, dan pengalaman belajar. Namun, data juga memperlihatkan bahwa semakin progresif desain kurikulum, semakin besar pula tuntutan terhadap kapasitas guru, sekolah, supervisi, dan sistem pendukung. Dinayatakan secara sederhana, fase ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan tidak pernah berjalan dalam ruang kosong; ia selalu bergantung pada daya dukung implementasi. Dari data tersebut dapat ditarik beberapa pola, yaitu transformasi orientasi pembelajaran ke arah kompetensi, perluasan tanggung jawab guru dan sekolah, membesarnya kebutuhan pelatihan profesional, serta persistennya masalah administrasi dan ketimpangan sumber daya. Karena itu, hasil kedua menegaskan bahwa perubahan paradigma memang terjadi, tetapi keberhasilannya tetap bersifat parsial.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka menjadi titik paling mutakhir dalam evolusi kebijakan kurikulum Indonesia karena menghadirkan respons yang lebih langsung terhadap kelemahan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Data yang dibaca dalam bagian temuan memperlihatkan bahwa Kurikulum Merdeka dirancang untuk menyederhanakan struktur kurikulum, mengurangi beban administrasi, memperkuat pembelajaran berdiferensiasi, dan membuka ruang lebih luas bagi proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Berbeda dari fase-fase sebelumnya yang sering membebani guru dengan dokumen dan target materi yang padat, Kurikulum Merdeka justru menekankan fleksibilitas, kedalaman belajar, dan relevansi konteks. Pembelajaran berbasis proyek dan pilihan implementasi bertahap menunjukkan adanya upaya kebijakan untuk membuat sekolah bergerak sesuai kapasitasnya masing-masing. Jika dinyatakan kembali, data ini memperlihatkan bahwa negara mulai belajar dari kegagalan-kegagalan implementasi masa lalu dan mencoba menghadirkan solusi yang lebih adaptif. Kecenderungan yang muncul dari data ialah penyederhanaan struktur, penguatan otonomi pedagogis, penekanan pada karakter dan kompetensi, serta pengakuan terhadap keberagaman kondisi sekolah. Dengan demikian, hasil ketiga ini menjadi bukti adanya perubahan yang lebih humanis dan fleksibel dalam kebijakan kurikulum nasional.

Namun, data yang sama juga menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya terbebas dari masalah implementasi. Apa yang dibaca dalam bagian akhir temuan memperlihatkan bahwa guru masih menghadapi tantangan serius dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, penilaian formatif, dan proyek P5 secara berkualitas. Meskipun beban administrasi telah dikurangi dan struktur kurikulum telah disederhanakan, keberhasilan kebijakan ini tetap sangat bergantung pada kapasitas



pedagogis guru, dukungan pelatihan, kualitas supervisi, dan pemerataan sarana prasarana. Dengan kata lain, Kurikulum Merdeka memang menawarkan solusi terhadap dua persoalan besar masa lalu, yaitu kepadatan materi dan kerumitan administrasi, tetapi ia sekaligus membuka kebutuhan baru akan profesionalitas guru yang lebih tinggi. Jika data ini dinyatakan ulang, maka dapat dipahami bahwa fleksibilitas kurikulum bukanlah jaminan otomatis bagi keberhasilan pendidikan; fleksibilitas justru menuntut kesiapan sistem yang lebih matang. Tiga pola penting muncul dari temuan ini, yaitu peluang inovasi yang semakin luas, meningkatnya ketergantungan pada kualitas guru, dan risiko kesenjangan implementasi antarwilayah apabila pelatihan dan fasilitas tidak diperkuat secara merata.

Secara keseluruhan, hasil ketiga ini menjadi bukti bahwa evolusi kurikulum Indonesia mencapai satu fase baru yang dapat dibaca sebagai solusi kebijakan, tetapi sekaligus memperlihatkan emergency baru pada level implementasi. Kurikulum Merdeka tidak lagi menempatkan guru sekadar sebagai pelaksana administratif, melainkan sebagai perancang pengalaman belajar yang harus mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, konteks lokal, dan tujuan karakter kebangsaan. Ini merupakan transformasi yang sangat penting jika dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Akan tetapi, data juga menegaskan bahwa akar persoalan lama belum sepenuhnya hilang, hanya bentuknya yang berubah: dari masalah kepadatan isi dan kompleksitas dokumen menjadi masalah kapasitas diferensiasi, kualitas proyek, dan ketimpangan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, hasil akhir penelitian ini memperlihatkan empat kecenderungan besar, yaitu pergeseran dari sentralisasi ke fleksibilitas, perubahan dari orientasi isi ke kompetensi dan karakter, tetap berulangnya masalah implementasi, dan semakin pentingnya ekosistem pendidikan sebagai penentu keberhasilan kurikulum. Jadi, bukti ketiga menegaskan bahwa masa depan kurikulum Indonesia tidak semata bergantung pada desain yang lebih baik, tetapi pada kekuatan sistem untuk menerjemahkan fleksibilitas menjadi praktik belajar yang bermakna.

### **Discussion**

Penelitian ini bertujuan menganalisis evolusi kebijakan kurikulum di Indonesia sejak Kurikulum 1975 hingga Kurikulum Merdeka dengan menyoroti karakteristik setiap fase, pergeseran paradigma pembelajaran, dan tantangan implementasi yang menyertainya. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan pokok. Pertama, fase awal perkembangan kurikulum nasional—terutama Kurikulum 1975, 1984, dan 1994—memperlihatkan perubahan bertahap dari model pembelajaran yang sangat administratif menuju upaya pedagogis yang lebih aktif, meskipun masih dibatasi oleh struktur birokratis dan kepadatan materi. Kedua, fase KBK 2004, KTSP 2006, dan Kurikulum 2013 menandai pergeseran yang lebih jelas ke arah pembelajaran berbasis kompetensi, otonomi sekolah, dan penguatan keterampilan abad ke-21, tetapi implementasinya belum merata



karena kapasitas guru dan dukungan kelembagaan masih terbatas. Ketiga, Kurikulum Merdeka muncul sebagai bentuk reformasi yang lebih fleksibel, humanis, dan adaptif, namun tetap menghadapi tantangan implementasi yang tidak ringan. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa perubahan kurikulum di Indonesia bukan sekadar pergantian dokumen kebijakan, melainkan proses transformasi pendidikan yang terus bergerak, tetapi berulang kali berhadapan dengan masalah implementasi yang relatif serupa dari satu fase ke fase berikutnya.

Hubungan utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah hubungan antara desain kebijakan kurikulum, pergeseran paradigma pembelajaran, dan kualitas implementasi di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setiap perubahan kurikulum pada dasarnya lahir sebagai respons atas kelemahan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1975 terlalu administratif, sehingga Kurikulum 1984 memperkenalkan pembelajaran aktif; Kurikulum 1994 terlalu padat, sehingga lahirlah KBK 2004 yang menekankan kompetensi; KTSP 2006 membuka otonomi sekolah; Kurikulum 2013 mencoba mengintegrasikan karakter, literasi, dan pendekatan ilmiah; lalu Kurikulum Merdeka hadir untuk menyederhanakan struktur dan memberi fleksibilitas yang lebih luas. Pertanyaannya adalah: mengapa hasil implementasinya sering belum optimal? Penjelajarannya terletak pada ketidakseimbangan antara perubahan desain dan kesiapan sistem pelaksana. Kurikulum berubah lebih cepat daripada kapasitas guru, budaya sekolah, model supervisi, dan pemerataan sarana pendidikan. Karena itu, hubungan sebab-akibat yang tampak dalam penelitian ini adalah bahwa semakin progresif desain kurikulum, semakin besar pula tuntutan terhadap kompetensi pedagogis, dukungan institusional, dan kualitas pendampingan. Tanpa kesiapan itu, perubahan paradigma pada level kebijakan cenderung hanya menghasilkan inovasi normatif, bukan transformasi pembelajaran yang konsisten.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan persamaan sekaligus perbedaan yang memperlihatkan letak novelty-nya. Persamaannya, penelitian ini sejalan dengan pandangan Tilaar (2002) dan Bjork (2013) bahwa perubahan kurikulum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pendidikan dan orientasi negara. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Ahsan dan Nur (2019), Suryani (2018), serta Rahmawati (2021) bahwa kesiapan guru merupakan faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Selain itu, penelitian ini selaras dengan kerangka OECD (2012), UNESCO (2004), dan Kemendikbudristek (2022) yang menempatkan pembelajaran abad ke-21, diferensiasi, dan fleksibilitas sebagai orientasi penting pendidikan masa kini. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Banyak studi sebelumnya membahas satu kurikulum tertentu secara terpisah – misalnya hanya Kurikulum 2013 atau hanya Kurikulum Merdeka – sedangkan



penelitian ini membaca keseluruhan perubahan sejak 1975 hingga sekarang sebagai satu proses evolutif. Di situlah novelty penelitian ini berada: bukan hanya menilai satu kurikulum, tetapi memetakan kesinambungan masalah, perubahan orientasi, dan pola berulang dalam kebijakan kurikulum Indonesia selama hampir lima dekade secara historis, komparatif, dan integratif.

Makna yang terkandung dalam hasil penelitian ini menjadi lebih jelas apabila diletakkan dalam konteks sosial, historis, dan ideologis pendidikan Indonesia. Secara historis, perubahan kurikulum mencerminkan cara negara merespons perubahan zaman, mulai dari kebutuhan modernisasi birokratis pada era kurikulum awal hingga kebutuhan fleksibilitas dan pembelajaran mendalam pada era Kurikulum Merdeka. Secara sosial, kurikulum berfungsi bukan hanya sebagai pengatur isi pembelajaran, tetapi juga sebagai alat untuk menyiapkan warga negara yang dianggap sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional pada setiap fase sejarahnya. Secara ideologis, evolusi kurikulum Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang lebih berorientasi pada kontrol negara menuju pendekatan yang mulai memberi ruang pada kebutuhan siswa, konteks lokal, dan pengembangan karakter kebangsaan, terutama melalui Profil Pelajar Pancasila. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak sekadar memperlihatkan perubahan teknis dalam struktur kurikulum, tetapi juga menandai perubahan dalam cara pendidikan dipahami: dari alat transmisi pengetahuan yang baku menuju sarana pembentukan kompetensi, karakter, dan kapasitas hidup. Dalam pengertian ini, kurikulum menjadi cermin perubahan visi negara tentang manusia ideal yang ingin dibentuk melalui pendidikan.

Hasil penelitian ini juga memiliki implikasi reflektif yang penting, baik dalam arti fungsi maupun disfungsinya. Secara fungsional, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum Indonesia terus bergerak ke arah yang secara konseptual semakin progresif. Ada penguatan pada kompetensi, karakter, pembelajaran aktif, fleksibilitas, dan diferensiasi. Ini berarti negara semakin menyadari bahwa pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan isi, tetapi juga harus membentuk cara berpikir, kemampuan beradaptasi, dan kepekaan terhadap konteks. Namun secara disfungsional, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan kurikulum yang terlalu sering, tanpa dukungan implementasi yang kuat, dapat menimbulkan kelelahan kebijakan di tingkat sekolah. Guru berpotensi menjadi subjek yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tanpa memperoleh dukungan pelatihan yang memadai. Sekolah-sekolah dengan sumber daya rendah semakin rentan tertinggal ketika kurikulum menuntut inovasi yang tidak selalu ditopang fasilitas dan pendampingan. Dengan demikian, implikasi penting dari hasil penelitian ini adalah bahwa reformasi kurikulum dapat berfungsi sebagai motor pembaruan, tetapi juga dapat menjadi sumber ketimpangan baru jika implementasi tidak dirancang secara realistis dan berkeadilan.



Atas dasar temuan tersebut, tindakan kebijakan yang perlu dilakukan tidak cukup hanya berupa penyempurnaan dokumen kurikulum, tetapi harus diarahkan pada penguatan ekosistem implementasi. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan kurikulum disertai program peningkatan kapasitas guru yang berkelanjutan, berbasis praktik, dan sensitif terhadap konteks daerah. Kedua, supervisi akademik perlu diubah dari model yang administratif menjadi model pendampingan profesional yang membantu guru menerjemahkan kurikulum ke dalam pembelajaran nyata. Ketiga, pemerataan sarana belajar dan akses terhadap sumber daya pendidikan digital harus menjadi prioritas, karena fleksibilitas kurikulum hanya akan bermakna jika sekolah memiliki daya dukung yang memadai. Keempat, evaluasi kebijakan kurikulum perlu dilakukan secara bertahap dan longitudinal agar pemerintah tidak terjebak dalam siklus perubahan yang cepat tetapi minim refleksi. Kelima, kolaborasi antar-guru, antar-sekolah, dan antar-pemangku kebijakan harus diperkuat agar implementasi kurikulum tidak menjadi beban individual. Dengan langkah-langkah ini, hasil penelitian tidak berhenti sebagai diagnosis akademik, tetapi dapat menjadi dasar tindakan kebijakan yang lebih realistis, sistemik, dan berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan Indonesia secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Temuan terpenting dari penelitian ini adalah bahwa evolusi kurikulum di Indonesia memperlihatkan satu pelajaran besar: keberhasilan pendidikan tidak terutama ditentukan oleh seberapa sering kurikulum diubah, melainkan oleh seberapa kuat sistem mampu mengimplementasikannya. Dari Kurikulum 1975 hingga Kurikulum Merdeka, selalu tampak adanya upaya negara untuk memperbaiki kelemahan kurikulum sebelumnya. Akan tetapi, pola yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata pada desain kurikulum, melainkan pada kapasitas guru, kesiapan sekolah, kualitas supervisi, dan pemerataan sumber daya pendidikan. Dengan demikian, hikmah penelitian ini adalah bahwa perubahan kurikulum harus dipahami sebagai proses transformasi yang memerlukan kesinambungan, bukan sekadar penggantian istilah, struktur, atau format dokumen. Kurikulum Merdeka memang menawarkan arah yang lebih fleksibel, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan siswa, tetapi peluang itu hanya dapat diwujudkan apabila didukung ekosistem pendidikan yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan kurikulum Indonesia bergantung pada kemampuan negara dan satuan pendidikan untuk menjadikan kebijakan sebagai praktik belajar yang benar-benar hidup, relevan, dan berkeadilan bagi semua peserta didik.

Kekuatan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menghubungkan tiga ranah yang sering dibahas secara terpisah, yaitu sejarah perubahan kurikulum, perubahan paradigma pembelajaran, dan problem implementasi di tingkat pendidikan. Dari sisi



keilmuan, penelitian ini memberikan sumbangan data berupa pemetaan longitudinal atas perkembangan kurikulum Indonesia selama hampir lima dekade. Dari sisi konsep, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia dapat dipahami bukan hanya sebagai fenomena kebijakan, tetapi juga sebagai proses evolutif yang memperlihatkan relasi antara ideologi pendidikan, orientasi pedagogis, dan kapasitas sistem. Dari sisi pendekatan, penggunaan analisis historis-kritis berbasis studi dokumentasi memungkinkan pembacaan yang lebih integratif dibanding studi-studi yang hanya menelaah satu kurikulum secara parsial. Penelitian ini juga membuka pertanyaan baru yang penting untuk kajian selanjutnya, misalnya bagaimana fleksibilitas Kurikulum Merdeka akan memengaruhi kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah, atau bagaimana guru memaknai pergeseran peran mereka dari pelaksana kurikulum menjadi perancang pengalaman belajar. Dalam arti ini, penelitian tidak hanya merangkum masa lalu kurikulum Indonesia, tetapi juga memperluas horizon diskusi tentang masa depannya.

Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini sepenuhnya berbasis studi dokumentasi, sehingga tidak melibatkan data lapangan berupa wawancara, observasi kelas, atau pengalaman langsung guru dan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum. Konsekuensinya, penelitian ini lebih kuat dalam membaca pola kebijakan dan gagasan kurikulum daripada menjelaskan secara mendalam variasi praktik di lapangan. Kedua, fokus penelitian ini berada pada level nasional dan historis, sehingga belum secara spesifik membandingkan implementasi kurikulum antarjenjang pendidikan, antardaerah, atau antartipe sekolah yang memiliki kondisi sosial dan kelembagaan berbeda. Ketiga, karena ruang kajian dibatasi pada evolusi dari Kurikulum 1975 hingga Kurikulum Merdeka, penelitian ini belum membahas secara rinci dinamika mikro seperti perubahan perangkat ajar, pengalaman siswa, atau dampak kurikulum pada hasil belajar tertentu. Keterbatasan ini sekaligus membuka ruang untuk penelitian lanjutan. Studi berikutnya perlu menggabungkan pendekatan dokumenter dengan data empiris lapangan, melakukan perbandingan antarwilayah, dan menelaah implementasi Kurikulum Merdeka secara longitudinal agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam, kontekstual, dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1) Ahsan, M., & Nur, L. (2019). *Teachers' readiness for curriculum change in Indonesia: A case study*. *Journal of Educational Reform*, 5(2), 115-128.
- 2) Alwasilah, A. C. (2012). *Pokoknya kualitatif: Dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.



- 3) Ansyar, M. (2015). *Kurikulum: Hakikat, fondasi, desain dan pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- 4) Bjork, C. (2013). *Indonesian education: Teachers, schools, and central bureaucracy*. Routledge.
- 5) Bolstad, R., & Gilbert, J. (2012). *Supporting future-oriented learning & teaching*. Ministry of Education, New Zealand.
- 6) Darling-Hammond, L. (2012). *Creating a comprehensive system for evaluating and supporting effective teaching*. Stanford Center for Opportunity Policy in Education.
- 7) Depdiknas. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK): Konsep dan implementasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- 8) Depdiknas. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Standar isi dan standar kompetensi lulusan*. Jakarta: Pusat Kurikulum.
- 9) Fadhilah, D. (2018). Implementasi kurikulum 2013 dalam meningkatkan kompetensi abad 21. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 51(3), 45-59.
- 10) Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. Teachers College Press.
- 11) Hasibuan, A. S., Purnomo, M. D., & Rafida, T. (2025). The teaching of English in writing class at senior high school: A multimodal discourse analysis. *Tell-Us Journal*, 11(3), 1109-1130.
- 12) Hidayah, F. N., Purnomo, M. D., & Daulay, S. H. (2025). Multimodality in the English textbook images: Gender representation analysis. *Getsempena English Education Journal*, 12(1), 76-90.
- 13) Hidayat, R., & Kurniawan, A. R. (2020). Adaptasi pembelajaran diferensiasi pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 188-202.
- 14) Irham, N. R., & Daulay, S. H., Purnomo, M. D (2024). Exploring linguistic knowledge in elementary learners: Challenges and barriers. *TELL-US Journal*, 9(4), 1013-1022.
- 15) Jalal, F., & Sardjunani, N. (2012). Reformasi pendidikan di Indonesia. *International Journal of Indonesian Education*, 2(1), 11-28.
- 16) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Dokumen pelaksanaan Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud.
- 17) Kemendikbud. (2020). *Kurikulum dalam kondisi khusus*. Jakarta: Kemendikbud.
- 18) Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- 19) Maarif Institute. (2016). *Evaluasi implementasi Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah Indonesia*. Jakarta: Maarif Institute.



- 20) Mahsun. (2019). *Pengembangan kurikulum dan pembelajaran bahasa*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- 21) Mulyasa, E. (2014). *Pengembangan dan implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- 22) Mulyasa, E. (2017). *Kurikulum Merdeka: Implementasi dan tantangan guru*. Bandung: Rosdakarya.
- 23) Mustikasari, D. W., Purnomo, M. D., & Imani, A. (2025). *Community Support: Practical Strategies for Professional Self-Care and Wellbeing. In Cultivating Wellbeing and Community through Writing in Academia* (pp. 97-105). Routledge.
- 24) Nation, I. S. P., & Macalister, J. (2010). *Language curriculum design*. Routledge.
- 25) OECD. (2012). *Education at a glance 2012: OECD indicators*. OECD Publishing.
- 26) Purnomo, M. D. (2016). Grammatical intricacy and lexical density in the texts of English handbooks at private Islamic junior high school level in Medan. *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 2(2).
- 27) Purnomo, M. D. (2017). *The power of language (Kuasa bahasa) dalam dimensi sosial, politik, budaya, dan pendidikan*. Naila Pustaka.
- 28) Purnomo, M. D., Basri, M. H., & Manik, N. (2025). Indonesian and Australian students' multimodal perceptions on master's English curriculum for global competition: A comparative study. *Register Journal*, 18(2), 236–259.
- 29) Puskur. (2010). *Evaluasi Kurikulum 2006 (KTSP)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
- 30) Puskurbuk. (1999). *Evaluasi implementasi kurikulum tingkat nasional*. Jakarta: Balitbang Kemendikbud.
- 31) Rahmawati, S. (2021). Kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 20(1), 77–89.
- 32) Rusman. (2018). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- 33) Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan pembelajaran: Teori dan praktik pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- 34) Santrock, J. W. (2001). *Educational psychology* (7th ed.). McGraw-Hill.
- 35) Schiro, M. (2013). *Curriculum theory: Conflicting visions and enduring concerns*. Sage Publications.
- 36) Soedijarto. (2000). *Pendidikan nasional sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- 37) Stiggins, R. (2014). *Revolutionize assessment: Empower students, inspire learning*. Corwin Press.



- 38) Sufairoh. (2016). Pendekatan scientific sebagai ciri khas Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 7(1), 22-34.
- 39) Supranoto. (2005). Evaluasi penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(3), 325-338.
- 40) Suryani, N. (2018). Tantangan guru dalam implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 35(2), 150-165.
- 41) Suyanto, S., & Jihad, A. (2013). *Menjadi guru profesional: Strategi meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru*. Jakarta: Erlangga.
- 42) Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- 43) UNESCO. (2004). *Education for All global monitoring report 2004: The quality imperative*. UNESCO Publishing.
- 44) Zahroh, A. (2019). Analisis konseptual Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 28(3), 199-210.

